

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu keberlanjutan (*sustainability*) menjadi topik yang sering dibahas dalam dunia bisnis seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak aktivitas perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) sebagai bagian dari konsep *triple bottom line*. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab serta memberikan informasi yang transparan mengenai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian perusahaan diharapkan mampu memperoleh legitimasi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Ludianah *et al.*, 2022).

Salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pemasaran sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, perusahaan pertambangan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Besarnya dampak operasional perusahaan pertambangan

menyebabkan perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hidayah *et al.*, 2021).

Di era globalisasi ini perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam lingkup domestik, melainkan menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang dituntut untuk transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, transparansi tersebut diwujudkan melalui penyusunan *sustainability report disclosure* (SRD). *Sustainability report disclosure* merupakan pengungkapan informasi mengenai kinerja aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial serta menjadi media bagi perusahaan untuk menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya dalam menilai komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan (Lako, 2018).

Laporan keberlanjutan tersebut disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada pemegang saham maupun masyarakat mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya. Melalui laporan ini, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjalankan kegiatan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (Hahn & Kühnen, 2013).

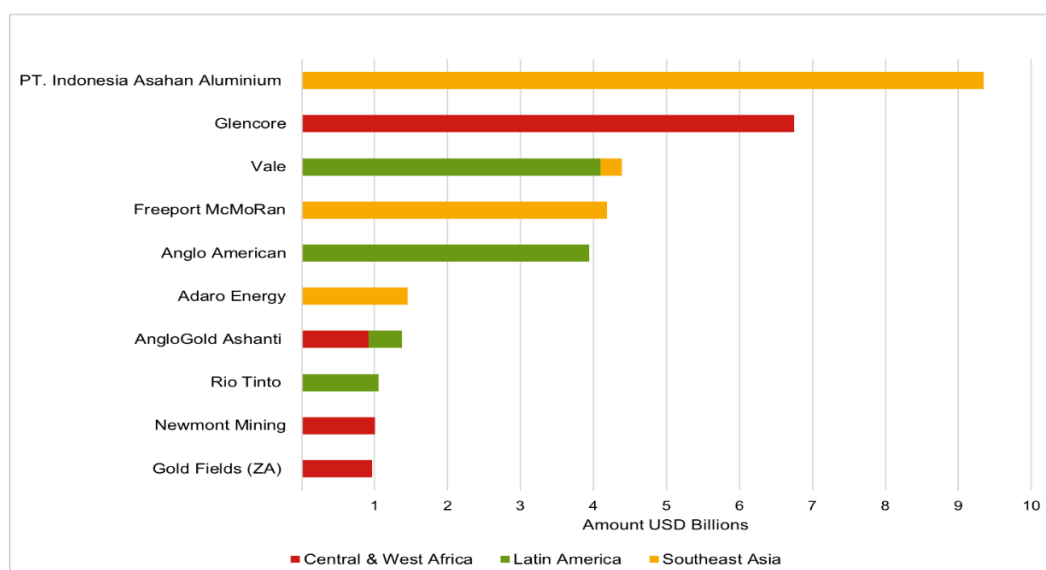
Selain itu, pedoman yang paling banyak digunakan dalam penyusunan Sustainability Report adalah Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021,

karena dalam *GRI Standards* (2021) dijelaskan bahwa pelaporan berkelanjutan membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Sustainability report disclosure* digunakan sebagai media yang menampilkan kebutuhan dan transparansi kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang bisa dilihat secara langsung bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Dewi & Pitriasari, 2019).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi perusahaan, pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh diterbitkannya berbagai regulasi yang mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan serta menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, masih terdapat perusahaan pertambangan yang belum secara konsisten menerbitkan *sustainability report* secara terpisah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengungkapan laporan berkelanjutan pada perusahaan pertambangan masih belum optimal.

Fenomena tersebut juga dapat dilihat dari kasus pengelolaan limbah *tailing* pada PT Freeport Indonesia di Papua. Perusahaan tersebut membuang limbah *tailing* melalui Sungai Agugawagon dan Ajikwa ke area penampungan Ajikwa

yang dimodifikasi dengan luas sekitar 230 km². Praktik tersebut menimbulkan perhatian publik karena berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan serta memunculkan tuntutan agar perusahaan menyampaikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dampak operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya *Sustainability Report Disclosure* sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan, strategi, serta upaya yang dilakukan dalam mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara terbuka kepada para pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap komitmennya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.



Gambar 1. 1 Perusahaan dengan Dampak Lingkungan Terbesar Tahun 2016-2021

Sumber: *Forests & Finance* (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat fenomena yang terjadi menurut laporan *TuK INDONESIA* sebagai anggota koalisi *Forest & Finance* bersama

WALHI, PT Freeport Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang dinilai memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Operasional Freeport di Papua bukan hanya menyebabkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengganggu sumber kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan pertambangan memiliki konsekuensi yang besar terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga membutuhkan transparansi informasi yang memadai. Dalam kondisi demikian, *sustainability report disclosure* menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak operasional, kebijakan keberlanjutan, strategi pengelolaan risiko, serta upaya mitigasi yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Melalui pengungkapan yang lengkap, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada PT Vale Indonesia Tbk tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan struktur kepemilikan setelah divestasi saham kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) sehingga MIND ID menjadi pemegang saham pengendali. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perombakan susunan direksi melalui RUPSLB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur kepemilikan dan susunan direksi pada PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, fungsi

pengawasan, serta transparansi perusahaan. Salah satu bentuk transparansi tersebut diwujudkan melalui pengungkapan Sustainability Report Disclosure yang memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. (media.alkhairaat.id). Selain itu, pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh *Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.* sebagai bagian dari *Banpu Group*, dengan kepemilikan sekitar 65–66%, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik dan investor institusional. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan adanya pengawasan terhadap manajemen sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan transparansi informasi, termasuk melalui *sustainability report disclosure* sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Katadata, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih menghadapi tuntutan untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan *sustainability report disclosure*. Meskipun sebagian perusahaan telah menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, kualitas dan keluasan informasi yang diungkapkan mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola masih bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report disclosure* pada perusahaan pertambangan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *sustainability report disclosure* menjadi penting untuk dilakukan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report disclosure*, di antaranya yaitu ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Faktor pertama yang diduga mampu memengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan adalah ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. (Lutfi, 2022). Ukuran dewan direksi (*board size*) didefinisikan sebagai jumlah total anggota dewan, yang mencakup direktur eksekutif dan non-eksekutif. Ukuran dewan memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan, termasuk dalam menetapkan kebijakan keberlanjutan dan tingkat keterbukaan informasi pada *sustainability report disclosure*. Ukuran dewan yang lebih besar berpotensi memiliki keberagaman keterampilan dan pengalaman, sehingga mendukung pengungkapan informasi yang lebih komprehensif dan kredibel (Principale, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Martinez *et al.*, (2017) dengan judul penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif signifikan dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Hal ini dikarenakan dewan yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang kuat. Sejalan dengan penelitian Mardawi *et al.* (2023), Hasil ini juga menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report disclosure* karena dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar menyediakan sumber daya kognitif yang lebih banyak

Namun penelitian Fuente *et al.*, (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang terlalu besar kurang bagus bagi perusahaan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan tidak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu *et al.*, (2024) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*.

Faktor kedua yang diduga mampu memengaruhi *sustainability report disclosure* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar (Lestari, 2017). Semua perusahaan yang berstatus *go public* dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan yang sebagian besar proporsi sahamnya dimiliki oleh publik dan secara otomatis perusahaan harus melaporkan seluruh aktivitas dan keadaan perusahaan kepada publik agar masyarakat sebagai salah satu bagian dari pemegang saham mengetahui keadaan perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan saham antara satu pihak dengan institusi lain yang terlibat adalah berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi (Hasibuan, 2001).

Tingginya kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya melalui pengungkapan *sustainability report disclosure* secara luas dan transparan agar tidak terjadi asimetri informasi antara agen dan principal. Penelitian mengenai kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure* dilakukan oleh (Hidayah & Yusuf, 2024). yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh

positif terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*. Sujatnika *et al.*, (2023) juga menunjukkan adanya hasil yang berpengaruh positif signifikan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure* sejalan dengan (Hardika *et al.*, 2018). Milawati & Abdillah, (2025), juga menunjukkan adanya hasil yang berpengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*. Sebaliknya, menurut Ludianah *et al.*, (2022) menunjukan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*.

Faktor terakhir yang diduga mampu memengaruhi *sustainability report disclosure* adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan manajemen maupun kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensinya. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan posisi yang independen, dewan komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap kebijakan manajemen serta mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi secara lebih transparan (Ludianah *et al.*, 2022).

Berdasarkan teori legitimasi (*Legitimacy Theory*), perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan mengenai aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini, dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas yang memastikan perusahaan

melaksanakan praktik tata kelola yang baik serta memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris independen, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk menyajikan Sustainability Report Disclosure secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan (Pratitarari & Honggowati, 2025)

Menurut (Aulia et al., 2023) dewan komisaris independen berpengaruh positif yang signifikan terhadap sustainability report disclosure. Sejalan dengan penelitian (Vina et al., 2023) penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh positif yang signifikan terhadap sustainability report disclosure. Sebaliknya menurut (Ludianah et al., 2022) dewan komisaris independen berpengaruh negatif yang signifikan terhadap sustainability report disclosure.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi mengenai faktor-faktor yang diduga memotivasi perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report disclosure*, Maka penulis tertarik untuk meneliti Kembali lebih dalam mengenai

”Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Sustainability Report Disclosure* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2025”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025?
3. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pemahaman yang lebih jelas mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability report Disclosure*) pada perusahaan pertambangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan akademik dalam memahami faktor-faktor yang mendorong tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti variabel serupa di sektor pertambangan maupun sektor lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Pertambangan

Memberikan masukan bagi manajemen perusahaan pertambangan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, khususnya melalui pengaruh ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap *sustainability report disclosure* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022-2025?

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti pengaruh ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan keberlanjutan di sektor pertambangan maupun sektor lainnya.